



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

RANWAL RENJA 2025

(Rancangan Awal Rencana Kerja)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.	7
2.1. Evaluasi Renja Tahun Lalu.....	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	22
2.2. Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah.....	2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB III : PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023..... ..	9
Tabel 2	:	Capaian Kinerja Pelayanan BPBD Tahun 2023..... ..	19
Tabel 3	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Program Kegiatan.....	28

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih, dengan harapan Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang optimal agar kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2025 lebih meningkat.

Pangkalan Bun, Maret 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



SYAHRUNI, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197308151999031012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode satu (1) tahun yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra selama jangka waktu satu tahun. Rancangan awal Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan BPBD . Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan Renja BPBD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pertaturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026;
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah untuk menjabarkan Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dan menyelaraskan antara prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rencana program kegiatan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2025

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Tahun Lalu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa kedudukan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah bagian dari perangkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026, yaitu Menurunnya Risiko Bencana dan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 melaksanakan Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program kegiatan dan anggaran dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang penanggulangan bencana dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Renja yang disusun setiap tahun. Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi kinerja program kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 1
Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=(8/7)x100		10 = 6 ÷ 8		15 = (10 / 5) x100	
1.05.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	%	100	29.962.939.731			100	4.970.198.780	100	4.862.259.883	100	98	100	4.862.259.883	100	16
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	50	125.969.000			13	44.790.214	13	44.781.621	100	100	13	44.781.621	26	36
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	10	107.951.000			2	41.250.714	2	41.242.121	100	100	2	41.242.121	20	38
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	4	2.960.000			1	740.000	1	740.000	100	100	1	740.000	25	25
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dok	4	5.560.000			1	1.390.000	1	1.390.000	100	100	1	1.390.000	25	25
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	4	2.460.000			1	615.000	1	615.000	100	100	1	615.000	25	25
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	dok	4	2.288.000			1	572.000	1	572.000	100	100	1	572.000	25	25
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	12	890.000			3	222.500	3	222.500	100	100	3	222.500	25	25
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	16	3.860.000			4	-	4	-	100	0	4	-	25	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	2.872	17.396.510.300			718	3.937.426.600	718	3.896.830.596	100	99	718	3.896.830.596	25	22
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	1.344	17.105.498.000			395	3.885.501.000	395	3.844.911.468	100	99	395	3.844.911.468	29	22
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	2.800	4.256.300			700	744.000	700	744.000	100	100	700	744.000	25	17
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	284.450.000			1	50.605.100	1	50.598.628	100	100	1	50.598.628	25	18
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	68	2.306.000			17	576.500	17	576.500	100	100	17	576.500	25	25
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	dokumen	20	840.000.000			9	91.530.331	6	54.797.255	67	60	6	54.797.255	30	7
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	paket	480	360.000.000				-			0	0			0	0
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	480.000.000			9	91.530.331	6	54.797.255	67	60	6	54.797.255	15	11

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=(8/7)x100		10 = 6+8		15 = (10 / 5) x100	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Dokumen	44	1.691.566.000			8	175.029.647	8	174.892.666	100	100	8	174.892.666	18	10
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	33.109.000			1	5.879.837	1	5.779.580	100	98	1	5.779.580	25	17
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	400.467.000			1	29.763.337	1	29.729.879	100	100	1	29.729.879	25	7
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	400.897.000			1	9.134.103	1	9.133.900	100	100	1	9.133.900	25	2
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	91.216.000			1	5.199.310	1	5.197.900	100	100	1	5.197.900	25	6
1.05.01.2.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	16	765.877.000			4	125.053.060	4	125.051.407	100	100	4	125.051.407	25	16
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	32	1.905.660.000			8	400.778.388	8	377.997.783	100	94	8	377.997.783	25	20
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	16	479.372.000			4	85.106.988	4	64.315.099	100	76	4	64.315.099	25	13
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	16	1.426.288.000			4	315.671.400	4	313.682.684	100	99	4	313.682.684	25	22
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	56	5.423.993.000			12	320.643.600	12	312.959.962	100	98	12	312.959.962	21	6
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	Unit	4	335.000.000			1	39.005.500	1	38.689.812	100	99	1	38.689.812	25	12
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang disediakan jasa pemeliharaannya	Unit	196	1.630.735.000			52	199.838.100	52	192.938.200	100	97	52	192.938.200	27	12
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	64	1.758.258.000			21	14.460.000	21	14.460.000	100	100	21	14.460.000	33	1
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	480.000.000			1	67.340.000	1	66.871.950	100	99	1	66.871.950	13	14
1.05.03	Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk yang mendapat layanan kebencanaan sesuai SPM sub Urusan Bencana	%	100	29.885.574.890			100	26.551.404.220	683,8	26.464.587.095	684	100	683,8	26.464.587.095	684	89
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang medapat layan informasi rawan bencana	Orang	4.500	3.720.000.000			200	724.070.000	1.696	692.710.670	848	96	1.696	692.710.670	38	19
1.05.03.2.01.001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	760.000.000			1	525.564.000	1	496.398.120	100	94	1	496.398.120	100	65
1.05.03.2.01.002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	3.200	2.960.000.000			200	198.506.000	1.696	196.312.550	848	99	1.696	196.312.550	53	7

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=(8/7)x100		10 = 6 + 8		15 = (10 / 5) x100	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Orang	2.480	14.721.912.145			190	24.586.682.715	1.564	24.502.358.025	823	100	1.564	24.502.358.025	63	166
1.05.03.2.02.002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	2.400	3.200.000.000			90	28.922.500	1.324	26.042.500	1.471	90	1.324	26.042.500	55	1
1.05.03.2.02.003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	32	7.909.462.000			12	203.677.400	12	183.369.561	100	90	12	183.369.561	38	2
1.05.03.2.04.006	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	8	710.000.000			1	24.354.082.815	1	24.292.945.964	100	100	1	24.292.945.964	13	3.422
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penduduk yang mendapat layanan penanganan darurat bencana	Orang	400	9.858.796.448			100	1.215.855.025	5.888	1.207.865.573	5.888	99	5.888	1.207.865.573	1.472	12
1.05.03.2.03.002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	16	160.000.000			9	19.126.000	1	17.471.000	11	91	1	17.471.000	6	11
1.05.03.2.03.003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	2.240.000.000			100	606.882.000	5.888	600.959.573	5.888	99	5.888	600.959.573	5.888	27
1.05.03.2.03.004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	712.000.000			100	113.006.325	417	112.959.400	417	100	417	112.959.400	417	16
1.05.03.2.03.005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	48	5.946.796.448			12	476.840.700	12	476.475.600	100	100	12	476.475.600	25	8
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah regulasi, peraturan, prosedur teknis, tatakelola kelembagaan bencana dan dokumen penanganan pasca bencana	Dokumen	84	1.584.866.298			1	24.796.480	1	22.893.827	100	92	1	22.893.827	1	1
1.05.03.2.04.002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	8	514.866.298			1	24.796.480	1	22.893.827	100	92	1	22.893.827	13	4
		Total			59.848.514.621				31.521.603.000		31.326.846.978		99		31.326.846.978		52

Sumber : Data BPBD 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat realisasi capaian kinerja sampai dengan pertanggal 31 Desember tahun 2023 ada beberapa sub kegiatan yang capaian kinerjanya masih dibawah target, namun sudah beberapa yang telah mencapai target.

❖ **Analisa kinerja program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja**

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja Renja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Capaian kinerja sub kegiatan sebesar 67%, dari target 9 orang yang difasilitasi pelaksanaan kegiatan bimtek hanya terlaksana 6 orang, terdapat kegiatan bimtek perencanaan yang tidak dilaksanakan karena tidak adanya undangan pelaksanaan bimtek.

2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub kegiatan sebesar 11%, dari target 9 dokumen penetapan status bencana hanya terdapat 1 kejadian bencana yang ditetapkan dengan penetapan dengan status bencana (Siaga Bencana) dengan respon kurang dari 24 jam yaitu bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Kinerja sub kegiatan tidak diukur berdasarkan perbandingan jumlah dokumen yang ditetapkan dengan jumlah target dokumen, melainkan jumlah dokumen yang ditetapkan sesuai tenggat waktu respon cepat darurat bencana yaitu kurang dari 24 jam.

❖ **Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja**

Adapun sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 8) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 14) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 20) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 22) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- 23) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 24) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Meskipun sampai dengan akhir tahun sub kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi target kinerja, namun

dalam pencapaian target rencana aksi pada tiap triwulan masih terdapat sub kegiatan yang mengalami kendala, faktor penyebabnya adalah :

- Jadwal kegiatan tidak tersusun dengan baik
- Belum dibuatnya kartu kendali kegiatan
- Keterbatasan personel yang menangani administrasi bidang
- Adanya hambatan alam yang mengharuskan penundaan pelaksanaan kegiatan
- Adanya benturan waktu jadwal kegiatan dengan pihak luar yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan (narasumber)

❖ **Realisasi program kegiatan yang telah melebihi target kinerja**

Realisasi kinerja sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 realisasi kinerja sebanyak 1.696 orang dari target 200 orang dengan demikian nilai kinerja sub kegiatan mencapai 848%. Dalam rangka pencapaian target sasaran dan indikator tersebut diatas dilaksanakan dengan strategi peningkatan layanan informasi rawan bencana melalui :

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara tatap muka maupun daring. Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan sosialisasi sebanyak 91 kegiatan sosialisasi kebencanaan dengan sasaran masyarakat di daerah rawan bencana antara lain kepada aparatur pemerintah, pelajar dan mahasiswa, karyawan perusahaan

serta masyarakat/relawan penanggulangan bencana. Adapun jumlah peserta kegiatan sosialisasi seluruhnya mencapai 1.696 orang.

- Pemasangan spanduk, baleho dan pembagian pamflet. Pada tahun 2023 telah dibagikan pamflet sebanyak 770 lembar dan terpasang 68 unit baleho informasi kerawanan bencana yang terpasang di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kumai, Arut Selatan dan Kotawaringin Lama.
- Pemasangan iklan edukasi kebencanaan di stasiun radio. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penayangan KIE kebencanaan melalui Stasiun Radio yang tayang sebanyak 6 kali tayang/hari selama 150 hari dengan materi Edukasi Karhutla dan Cuaca Ekstrem. Adapun estimasi jangkauan siaran adalah se Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Peningkatan layanan Informasi Kebencanaan melalui pemasangan rambu-rambu kebencanaan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pemasangan rambu-rambu kebencanaan berupa:
 - ✓ Rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul sebanyak 15 unit
 - ✓ Rambu Peringatan Kawasan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi sebanyak 2 unit
 - ✓ Rambu Peringatan Kawasan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 4 unit

2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi. Target jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 90 orang. Pada tahun 2023

terdapat realisasi pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi sebanyak 1324 orang dari target sebanyak 90 orang, sehingga capaian kinerja sub kegiatan sebesar 1471%.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja adalah meningkatnya peran serta kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana, kelompok masyarakat, perusahaan swasta, BUMN melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat secara mandiri dengan melibatkan BPBD sebagai narasumber.

3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sasarannya adalah terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi ke tempat yang aman, dengan indikator jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 100 orang. Jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi sampai dengan triwulan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 5.888 orang dengan demikian capaian kinerja sub kegiatan adalah 5.888% dari 240 kejadian bencana selama tahun 2023. Jenis bencana dengan korban yang memerlukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi meliputi bencana banjir dan kekeringan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah :

- Penetapan target kinerja terlalu rendah, penetapan target tidak berdasar pada data realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

- Pelaksanaan aktivitas Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana bersifat situasional sesuai dengan intensitas kejadian bencana.

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah :

- Melaksanakan posko induk siaga bencana di BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Tim untuk kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, yang tersedia 24 jam guna merespon setiap kejadian bencana yang dilaporkan di BPBD
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dengan baik
- Terlaksananya sistem komunikasi dan koordinasi antar instansi dan stakeholder dalam upaya penanganan bencana.

4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sasarannya adalah terdistribusinya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Target kinerja sub kegiatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 100 orang, sedangkan realisasi adalah 417 orang sehingga capaian kinerja sub kegiatan sebesar 417%. Nilai capaian kinerja sangat tinggi dikarenakan dalam penetapan target kinerja tidak berdasarkan pada data realisasi beberapa tahun terakhir. Realisasi kinerja bersifat situasional tergantung intensitas kejadian bencana.

Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah :

- Ketersediaan sarana mobilitas penanganan bencana
- Ketersediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- Kerjasama tim penanggulangan bencana BPBD maupun tim dari lintas instansi terkait dalam penyediaan dan pendistribusian bantuan logistik.

❖ **Implikasi terhadap capaian Sasaran Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah**

Tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana sebagaimana tersebut pada tabel :1 di atas tidak berimplikasi yang signifikan pada kinerja sasaran Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada sub kegiatan yang pelaksanaannya bersifat situasional. Jumlah kejadian bencana, jumlah korban yang seharusnya mendapat pertolongan dan distribusi logistik akan menyesuaikan dengan kejadian di lapangan.

Realisasi kinerja sasaran RPD yang diampu oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Indeks Ketahanan Daerah, pada tahun 2023 telah melampaui target kinerja pada akhir tahun RPD 2023-2026. Realisasi nilai skor IKD tahun 2023 mencapai 0,56 sedangkan target pada akhir tahun RPD hanya 0,50. Implikasi atas pencapaian nilai IKD tersebut maka akan dilakukan perubahan target kinerja sasaran RPD (IKU Kabupaten).

❖ **Kebijakan perencanaan dan penganggaran**

Kebijakan yang perlu diambil dalam menyikapi pencapaian kinerja Sasaran Renstra dan kinerja sasaran RPD periode 2023-2026 adalah dengan menetapkan target kinerja dan porsi anggaran secara proporsional pada sub kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja penurunan Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana terutama pada kapasitas pencegahan dan penanganan darurat bencana, antara lain :

- 1) Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi
- 2) Penyusunan Dokumen Rencana Penangganasn Kedaruratan Bencana

- 3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
- 4) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC).
- 5) Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi Rawan Bencana
- 6) Penanganan Kedaruratan bencana

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi :

- Pelayanan informasi rawan bencana,
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana .

Capaian kinerja pelayanan BPBD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 2
Capaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023

No.	Jenis Layanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	KETERANGAN
1	Layanan Informasi Rawan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	1 dokumen	100%	Dokumen KRB telah disusun, SK dalam proses tandatangan Bupati
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	200 orang	1696 orang	848%	Target pada tahun 2023 : 200 orang Realisasi pada tahun 2023 : 1696 Orang
2	Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	-	0%	Belum dilakukan penyusunan dokumen RPB, direncanakan pada tahun 2024
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	-	-	0%	Belum dilakukan penyusunan dokumen Renkon, direncanakan pada tahun 2024 dan 2025
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	90 orang	1324 orang	1471%	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 orang	240 orang	240%	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan				Tidak terdapat aktifitas pencarian dan pertolongan korban bencana

No.	Jenis Layanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	KETERANGAN
3	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%		0%	tidak terjadi Kejadian Luar Biasa selama tahun berjalan
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	Jumlah penetapan status bencana adalah 1 SK penetapan Status Siaga Karhutla ditindaklanjuti dengan Aktivasi Posko Siaga Bencana dan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	Jumlah Petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 151 Orang Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana 151 Orang
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi : 5.888 Orang Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana : 5.888 Orang

Sumber : Data BPBD 2023

Sebagaimana disajikan dalam tabel 2 tersebut diatas, kinerja pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah pada tahun 2023 pada secara keseluruhan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan (2023). Terdapat 2 indikator pada jenis layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang tidak terdapat nilai target dan realisasinya, dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan direncanakan pada tahun 2024 dan 2025.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah adalah :

- 1) Kertersediaan sarana penanggulangan bencana yang cukup memadai.
- 2) Jumlah personil penanggulangan bencana yang cukup memadai.
- 3) Kerjasama dan tanggung jawab personil dalam melaksanakan tugas.
- 4) Kerjasama dengan lintas instansi dan kelompok relawan penanggulangan bencana yang baik.
- 5) Adanya dukungan anggaran yang lebih fleksibel (BTT) untuk penanganan darurat bencana.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Keamanan dan keselamatan warga negara adalah amanat undang-undang yang menjadi garis besar penetapan kebijakan suatu daerah secara umum, dan secara khusus memberikan perlindungan bagi warga negara. Sebagai arus utama pengembangan berkelanjutan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan koncern penting suatu wilayah. Wilayah yang aman dari kejadian bencana dan memiliki nilai risiko bencana yang rendah, menjadi tujuan utama pengelolaan penanggulangan bencana.

Salah satu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah adalah “Menurunnya Risiko Bencana”, dengan indikator **Indeks Ketahanan Daerah**. BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lembaga teknis yang menangani kebencanaan merupakan Perangkat Daerah yang menggemban pencapaian indikator kinerja tersebut mempunyai peran strategis dalam upaya meningkatkan Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Barat akan terus ada dimasa mendatang sesuai dengan kondisi karakteristik geografis dan ekologis wilayah. Isu-isu tersebut antaralain :

- Kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2023 dikeluarkan oleh BNPB, Kabupaten Kotawaringin Barat masih tergolong daerah dengan tingkat risiko bencana **sedang** dengan nilai Indeks Risiko Bencana sebesar **109,7**, sedangkan nilai skor Indeks Ketahanan Daerah mencapai 0,56 dengan katagori **sedang**
- Upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan dengan pendekatan struktural melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan serta

penanganan secara tematik pada kawasan risiko bencana (kawasan gambut dan pengelolaan daerah aliran sungai);

- Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan, sistem deteksi/peringatan dini, penyediaan dokumen Rencana Kontijensi, dokumen Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor dan stakeholder terkait penanggulangan bencana;

Perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif akan menjadi pilihan utama dalam upaya mengurangi risiko bencana. Diperlukan upaya yang terus menerus untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas semua stakeholder terkait penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 - 2026 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 adalah ***“Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan”***, dengan sasaran ***“Menurunnya Risiko Bencana”***. Berkenaan dengan hal tersebut sesuai tupoksi BPBD, maka rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 adalah ***“Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana”***

3.2 Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah ***“Meningkatnya Layanan Kebencanaan”***

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pencapaian kinerja Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2025 program yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1) *Program Penanggulangan Bencana*

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - Pengembangan Kapasitas TRC Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Saranas Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pengalokasian anggaran program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.

Rencana pengalokasian anggaran program kegiatan pada Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : 10
Rencana Kerja dan Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

Kode rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			-	2.856.047.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	3.145.652.645
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			-	242.698.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	266.967.910
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1140 Orang	242.698.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1140 Orang	266.967.910
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-	1.346.525.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	1.481.178.435
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Keluarga	54.973.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Keluarga	60.470.630
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	54.973.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	60.470.630
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	245.497.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	270.046.920
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	222.054.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	244.259.455

Kode rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	716.758.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	788.433.800
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kawasan	52.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Kawasan	57.497.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	1.037.595.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	1.141.355.270
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.318.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	22.350.075
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	608.054.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	668.859.675
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	86.981.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	95.679.320
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	322.242.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	354.466.200
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-		-	229.228.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	256.151.030
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	48.931.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	53.825.100
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kegiatan	45.372.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Kegiatan	49.910.080

Kode rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	37.000.000
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lamadalam 1 (satu) tahun	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	57.904.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	63.694.730
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lamadalam 1 (satu) tahun	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	47.019.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	51.721.120
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.849.834.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.316.108.551
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.285.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.913.500
1.05.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	962.500
1.05.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	962.500
1.05.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	705.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	775.500
1.05.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	705.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	775.500
1.05.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	1.072.500

Kode rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.01.0006.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	1.650.000
1.05.01.2.01.0007.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	715.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.458.896.689	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.904.786.358
1.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348 Orang/bulan	4.396.208.189	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		348 Orang/bulan	4.835.829.008
1.05.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Dokumen	500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 Dokumen	550.000
1.05.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	61.135.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	67.249.050
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	1.053.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Laporan	1.158.300
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.051.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.656.100
1.05.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	1.650.000
1.05.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	3.850.000
1.05.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	11.051.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	12.156.100
1.05.01.2.05	Administrasi Pegawaiian Perangkat Daerah				128.149.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.964.780
1.05.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Paket	19.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Paket	21.978.000
1.05.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	Kab.Kotawaringin Barat,	11 Orang	108.169.800	Pendapatan Asli		11 Orang	118.986.780

Kode rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daerah (PAD)			
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				185.720.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			204.292.978
1.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.056.605	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	5.562.265
1.05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	47.000.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	51.700.525
1.05.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.907.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	6.498.170
1.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.536.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	6.089.908
1.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Laporan	122.220.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Laporan	134.442.110
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				402.723.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			442.995.740
1.05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	85.108.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	93.618.800
1.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	317.615.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	349.376.940
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				238.218.523	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			262.040.376
1.05.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	33.367.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Unit	36.704.481
1.05.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	204.850.813	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Unit	225.335.895
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				413.789.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.336.458.719

Kode rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	38.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	42.889.000
1.05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53 Unit	291.039.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53 Unit	.201.433.719
1.05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	16.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Unit	18.106.000
1.05.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	67.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	74.030.000
J U M L A H					8.705.882.600				12.461.761.196

Sumber : SIPD-RI BPBD 2025

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat guna mendukung tercapainya target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Penentuan program kegiatan prioritas yang termuat dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 didasarkan pada indikator kinerja sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana, yaitu meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah. Pengalokasian anggaran masih bersifat dinamis terutama pada kegiatan-kegiatan program penunjang yang tidak bersifat rutin

Semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.